

SKRIPSI

**FUNGSI LEGISLASI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PADA
MASA TRANSISI (*LAME DUCK SESSION*)
PERIODE 2004-2024**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

SHATILA REFENA

2110112111

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



PEMBIMBING

**Dr.Charles Simabura, S.H., M.H.
Beni Kharisma Arrasuli,SH.I, LL.M.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025



No. Alumni Universitas	Shatila Refena	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Batam/02 Juli 2002	f. Tanggal Lulus : 01 September 2025	
b. Nama Orangtua : Refelta Ikasasman, Siti Nurjani	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 4 Tahun	
d. PK : Hukum Tata Negara	i. IPK : 3,79	
e. No. BP : 2110112111	j. Alamat : Batam	

**PENGATURAN FUNGSI LEGISLASI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PADA MASA TRANSISI
(LAME DUCK SESSION) PERIODE 2004-2024**

(Shatila Refena, 2110112111, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2025)

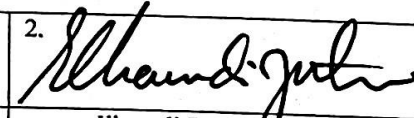
ABSTRAK

Pengaturan kekuasaan legislatif adalah aspek kunci dari pemerintahan demokratis. Masa lame duck, yang merujuk pada periode akhir jabatan presiden sebelum pergantian kepemimpinan, memberikan konteks yang unik dalam dinamika pembuatan undang-undang. Masa lame duck seringkali dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang untuk meloloskan undang-undang "titipan" yang mungkin sulit untuk dilakukan pada situasi politik normal, sehingga undang-undang tersebut tidak dibuat atas kepentingan rakyat yang mana justru merugikan rakyat, dan pada akhirnya menciptakan polemik di masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pokok permasalahan: Pertama, Bagaimana pengaturan fungsi legislasi di masa lame duck?, Kedua, Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di masa lame duck?. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada masa lame duck, pembuatan undang-undang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, serta adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Selain itu, faktor transisi pemerintahan dan keterbatasan waktu menjadi tantangan besar dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan fungsi legislasi pembentuk undang-undang pada masa lame duck juga menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan kewenangan legislasi untuk mengesahkan RUU kontroversial atau strategis yang sulit disahkan dalam situasi politik normal. Diharapkan adanya mekanisme pembatasan fungsi legislasi pembentuk undang-undang pada masa lame duck ini, juga penguatan prinsip transparansi dan partisipasi publik dan peningkatan pengawasan publik, media, serta organisasi masyarakat sipil pada periode lame duck ini.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Lame Duck, Transisi Pemerintah

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 1 September 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Delfina Gusman, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:



Alumni University Number	Shatila Refena	Alumni University Number
a. Place/Date of Birth : Batam/2 th Juli 2002		f. Graduation Date : September 1 st 2025
b. Parents' Name : Refelta Ikasasman, Siti Nurjani		g. Pass Predicate : Cumlaude
c. Faculty : Law		h. Length of Study : 4 Years
d. Concentration : Constitutional Law		i. GPA : 3,79
e. Student ID : 2110112111		j. Address : Batam

THE LEGISLATIVE FUNCTION OF LAWMAKERS DURING THE TRANSITION PERIOD (LAME DUCK SESSION) PERIOD 2004-2024

(Shatila Refena, 2110112111, Concentration Program Constitutional Law (CP V), Faculty of Law, Andalas University, 2025)

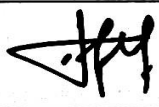
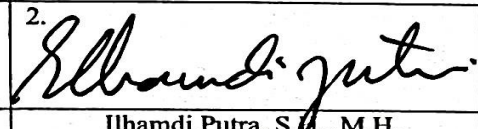
ABSTRACT

The regulation of legislative power constitutes a fundamental aspect of democratic governance. The lame duck period, defined as the final stage of a president's term prior to the transition of leadership, presents a unique context within the dynamics of lawmaking. This period is frequently utilized by lawmakers to enact so-called "entrusted" laws that would otherwise be difficult to pass under normal political circumstances. Consequently, such laws are often not aligned with the interests of the people, potentially resulting in harm to society and generating public controversy. This study raises two principal research questions: first, how is the legislative function regulated during the lame duck period?; and second, how is the legislative function implemented during the lame duck period? To address these questions, this research adopts a normative juridical methodology by employing a statute approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a historical approach. The findings reveal that lawmaking during the lame duck period is frequently driven by short-term political interests and influenced by pressure from specific interest groups. Moreover, the dynamics of political transition and limited time frames pose significant challenges to the formulation of policies that are inclusive and responsive to public needs. The exercise of legislative power during this period also demonstrates a tendency to approve controversial or strategic bills that are difficult to ratify under normal political conditions. Accordingly, this study highlights the necessity of establishing mechanisms to limit the legislative function during the lame duck period, while simultaneously reinforcing principles of transparency and public participation. Furthermore, it emphasizes the importance of strengthening oversight by the public, the media, and civil society organizations to ensure greater accountability during this transitional phase.

Keywords: Legislative Function, Lame Duck, Governance Transition.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at , September 1st 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Delfina Gusman, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of International Law: Arfini S.H., M.H.

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: